

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

I Wayan Yoniga Arta¹ Made Kembar Sri Budhi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: iwayanyonigaarta@gmail.com¹

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung variabel eksogen dan variabel endogen. Obyek dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti variabel tingkat pendidikan, pendapatan asli daerah, penduduk yang bekerja, dan investasi. Banyak pengamatan pada penelitian adalah 45 titik pengamatan, yaitu terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2018 - 2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh positif signifikan sedangkan UMK berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (2) Tingkat pendidikan, UMK, dan pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan penduduk bekerja berpengaruh positif dan tidak signifikan serta investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.; (3) Tingkat Pendidikan, UMK, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Penduduk yang Bekerja, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Indonesia, banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya, Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmaraga, 2011). Pembangunan ekonomi merupakan masalah penting dalam perekonomian suatu Negara yang menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Arsyad (1999:13), pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin meningkat dan kemajuan teknologi semakin tinggi. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi (Sukirno, 2011:3). Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata hingga menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, oleh sebab itu pemerintah selalu menetapkan target laju pertumbuhan di dalam perencanaan dan tujuan pembangunannya. Selain pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi penggerak utama dalam penurunan dan peningkatan kemiskinan (Fosu, 2010). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu kelemahan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah ketidaksetaraan ekonomi, dimana tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari kemajuan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Sementara di Indonesia sendiri walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia tidaklah terlalu besar apabila dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai karakteristik yang sama (Hill, 1998). Meskipun menurut penelitian tersebut kesenjangan wilayah di Indonesia bukan merupakan masalah yang besar, namun pada kenyataannya kesenjangan atau ketimpangan di Indonesia telah menjadi masalah yang besar dan belum terselesaikan hingga saat ini. Ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi antar provinsi namun juga daerah-daerah di dalam suatu provinsi. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah khususnya di Provinsi Bali dapat dilihat dari indikator perekonomian yang ada. Menurut Taufik, dkk (2014) menyatakan bahwa perkembangan laju pertumbuhan di suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Brutonya karena Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi dilaksanakan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum tidak hanya merujuk pada kesejahteraan ekonomi semata dengan pencapaian kepuasan individu secara maksimal, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan atau lingkungan sosial. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan alat ukur Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional. PDRB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar, baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang sifatnya global, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan persoalan di atas maka untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau daerah, ukuran yang lebih tepat adalah PDB atau PDRB perkapita atau pendapatan perkapita.

Provinsi Bali memiliki permasalahan dalam pemerataan dalam pembangunan ekonomi, permasalahan ini menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan (Yuni, dan Sudibia, 2014) hal ini dikarenakan kurang memperhatikan pertumbuhan penduduk atau struktur ekonomi. Provinsi Bali memiliki perbedaan latar belakang dan wilayah dari 9 kabupaten yang ada. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi sumber daya alam, ekonomi, geografis, sosial, dan budaya. Perbedaan yang ada tersebut merupakan salah satu indikator yang mampu menghambat berbagai macam perkembangan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Bali. Selain pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, tujuan utama dari suatu pembangunan adalah untuk menekan angka kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima, selain itu mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pendidikan, investasi dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan seperti dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Tingginya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah di Indonesia merupakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong rendah. Menurut Djojohadikusumo (1994:43) pola kemiskinan ada empat yaitu *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty* dan *accidental poverty*. Kemiskinan yang pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Tidak hanya Indonesia, Provinsi Bali sebagai salah satu wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat, namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, ini membuktikan bahwa kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas manusia (*human capital development*) sangat diperlukan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan kronis, salah satunya adalah melalui pendidikan, dimana pendidikan merupakan investasi jangka panjang mereka agar dapat secara permanen keluar dari kemiskinan (Inna, 2014). Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya dipandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tetapi sudah dipandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser.

Bali merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan bisnis pariwisatanya yang telah mendunia, hal tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Dengan semakin banyaknya jumlah

wisatawan yang datang ke Bali, Pemerintah Provinsi Bali tentu harus berusaha melakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu memaksimalkan peran dari masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Infrastruktur, investasi dan pendidikan berkualitas tinggi adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila hal ini diperhatikan oleh pemerintah maka akan mempersempit kesenjangan antar daerah dan sektor ekonomi wilayah dan pada saat yang bersamaan mampu meningkatkan produktivitas, yang akan mendorong pertumbuhan (Boediono 2017). Masyarakat pada era globalisasi saat ini harus memperoleh pendidikan yang layak karena ilmu yang didapatkan berguna bagi individualnya, selain itu masyarakat mampu memperoleh keterampilan yang lebih dalam bersaing terhadap dunia kerja yang ada. Menurut Michael (2007) Pendidikan sangat diperlukan bagi menunjang keberhasilan. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam proses peningkatan taraf hidup (Kurniawan, 2016). Hal ini perlu ditunjang oleh bantuan pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya dengan memberikan berbagai program-program maupun kebijakan wajib belajar sembilan (9) tahun untuk dapat menunjang dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Permasalahan mengenai investasi sumber daya manusia di dunia pendidikan dan kemiskinan hampir serupa. Umumnya menghadapi dilema apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih didahulukan ataukah investasi pendidikan yang lebih baik. Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan cukup penting karena pendidikan memiliki peranan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Haughton, 2012). Ranis dan Stewart (2001) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia. Variabel pendidikan itu sendiri berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Sudiharta dan Sutrisna, 2014). Menurut Septiana dkk (2015) pendidikan yang lebih luas adalah modal manusia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik, dimana kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan merupakan inti dari mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam mencapai kehidupan yang layak.

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, *Todaro (2003:413)* membuktikan bahwa pendidikan memang memiliki pengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan "modal manusia" di masa yang akan datang. *Constantinos (2009)* menyatakan peningkatan pendidikan secara umum dapat pula memperbesar produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut *Chon (1997)*, individu yang mengikuti pendidikan akan memperoleh banyak peluang untuk

memperoleh pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan peningkatan pendapatan di dalam kehidupannya, serta masyarakat memperoleh manfaat dari produktivitas tenaga kerja terdidik. Pendidikan yang semakin tinggi dapat menurunkan angka kemiskinan. *Sasih dan Saskara (2016)* dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain pendidikan, faktor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah yaitu adanya upah minimum kabupaten yang stabil. Upah minimum memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan rata-rata upah, dimana tingkat kemiskinan ikut berkurang seiring meningkatnya rata-rata upah pekerja, namun peningkatan pengangguran akibat dari upah minimum yang meningkat juga memberikan pengaruh pada bertambahnya tingkat kemiskinan.

Pendapatan bisa menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kemiskinan. Bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang biasa disingkat UM adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UM untuk setiap kabupaten/kota di suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Sedangkan UM kota/ kabupaten ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan memperhatikan pihak-pihak lain. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Jadi, semakin rendah upah minimum masyarakat maka, tingkat kemiskinan akan semakin besar. Demikian juga yang dipaparkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Romi & Umiyati, 2018) bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Selain upah minimum, penduduk yang bekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Umumnya seseorang yang berada pada usia produktif akan mampu memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (Rahayu, 2014), oleh karena itu penduduk yang bekerja pada umumnya akan mampu mendapatkan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak bekerja. Secara ekonomis penduduk yang bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, penduduk yang bekerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Masalah ketenagakerjaan juga merupakan fenomena yang masih perlu diperhatikan di Indonesia khususnya di Bali, apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Saat ini, banyak penduduk yang melakukan migrasi dan urbanisasi melihat peluang kerja di Provinsi Bali semakin besar. Dengan situasi seperti ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur penduduk, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk yang bekerja Tingkat kemiskinan yang masih ditoleransi meskipun tingkat produktivitas yang mencari pekerjaan tinggi mungkin menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan atau akses kesempatan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti kurangnya kebijakan redistribusi yang efektif, ketimpangan dalam pendapatan, atau masalah

struktural dalam pasar tenaga kerja yang menghambat mobilitas sosial dan ekonomi. Dalam situasi ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan akses kesempatan bagi mereka yang berada di tingkat produktivitas yang mencari pekerjaan.

Menurut Danawati dkk (2016), keberhasilan pembangunan di suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya jumlah pengeluaran pemerintah juga di pengaruhi oleh besarnya jumlah investasi yang terjadi di suatu daerah. Idealnya, setiap proses pembangunan termasuk di daerah didasarkan atas kemampuan sendiri (*self reliant development*) dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Kondisi objektif menunjukkan bahwa daerahdaerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal. Masalah kekurangan modal merupakan salah satu faktor yang paling sering mendapat perhatian lebih (Hendra, 1991). Investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu daerah maupun negara karena berperan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sulistiawati, 2012;29; Sarungu, 2013;112). Pemerintah memandang perlunya menempuh kebijakan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bentuk partisipasi dalam upaya menanggulangi masalah tersebut adalah dengan penanaman modal atau investasi. Investasi ialah pembelian barang-barang yang digunakan pada masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Kuantitas tenaga kerja dalam kegiatan produksi dipengaruhi oleh adanya peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat adanya permintaan (Taufik dkk, 2014). Ketepatan pemerintah dalam menentukan kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah, dan arah investasi ke daerah-daerah dapat menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah. Terserapnya tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, namun seandainya distribusi pengeluaran belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan di kabupaten/kota akan tetap terjadi sehingga masyarakat dengan penghasilan yang rendah tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk ikut berperan dalam proses pembangunan.

Menurut teori klasik bahwa invesasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang menambah jumlah alat – alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga Pertumbuhan Ekonomi meningkat. Sehubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi Sutawijaya (2007). Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan investasi. Investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat kepada kaum miskin Yusuf dan Summer (2015). Wihardjo (2014) menyatakan ada hubungan positif antara investasi atau penanaman modal asing dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian lain oleh Suciati, dkk. (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007 – 2012, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Kesejahteraan terus diupayakan untuk menekan dan mengurangi jumlah kemiskinan namun terlihat bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang signifikan yang berarti bahwa

tingginya jumlah kesejahteraan belum tentu berhubungan dengan kondisi Kemiskinan yang terjadi saat ini, dan sebaliknya kondisi Kemiskinan yang terjadi saat itu baik turun maupun naik tidak berhubungan dengan Kesejahteraan.

Investasi mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kesempatan kerja (Jordi et al., 2003). Secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan investasi seperti yang dinyatakan antara lain oleh Keynes dalam Jhingan (2003,133- 134) dan Mankiw (2006:93), Harrod Domar dalam Arsyad (2010:8286), Solow- Swan dalam Arsyad (2010:88-89), Kuznet dalam Arsyad (2010:277), Todaro (2000:136), dan Schumpeter dalam Sukirno (2008:122). Investasi dapat berupa penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan yang masih menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Tingkat pendidikan, pendapatan asli daerah (PAD), penduduk yang bekerja, dan investasi menjadi faktor-faktor yang sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu antara satu faktor dan faktor yang lainnya saling tidak terlepas satu sama lain. Berdasarkan latar belakang maka mendesak dilakukan sebuah penelitian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022? Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022? Apakah tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022? Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022. Untuk menganalisis pengaruh langsung tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022 ?

METODE PENELITIAN

Desain atau rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme. Eksplanasi yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah eksplanasi asosiatif, yaitu mengupas hubungan atau pengaruh antarvariabel. Variabel-variabel pengaruhnya adalah tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi. Sementara itu variabel intervening adalah pertumbuhan ekonomi, dan variabel terikat adalah tingkat kemiskinan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan alasan bahwa di Bali masih terdapat ketimpangan yang sangat lebar antar kabupaten/kota seperti yang dialami Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli sangat berbeda dengan kondisi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Fenomena kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebut tidak terlepas dari perbedaan- perbedaan kondisi tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, investasi, dan

pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Masih tingginya ketimpangan dan tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali menjadi alasan untuk pemilihan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian ini. Obyek dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti variabel tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi. Titik pengamatan pada penelitian ini adalah sebanyak 45 titik, yaitu terdiri dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2018 – 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.

1. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan/scoring (Sugiyono, 2017:10). Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi dalam negeri maupun asing di Provinsi Bali.
2. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto (Sugiyono, 2017:10). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya, artikel, buku dan literatur lainnya yang terkait dengan variabel dari penelitian ini.

Sumber data mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah Provinsi Bali, penerimaan upah minimum, penduduk yang bekerja, dan data investasi dalam negeri maupun luar negeri (asing) di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non perilaku, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2014:204-205). Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data sekunder di BPS, sesuai dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi geografis, iklim dan Demografi

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 km², terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara geografis pulau ini terletak 08°03'40" - 08°50'48" lintang selatan (LS) dan diantara 114°25'53" - 115°42'40" bujur timur (BT). Hal inilah yang membuat Bali beriklimWilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

Pembahasan

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan, UMK, Penduduk yang Bekerja, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 - 2022

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022

Secara statistik tingkat pendidikan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai positif sebesar 0,322. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar 0,322 bermakna apabila pendidikan meningkat 1 tahun maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen. Hasil regresi yang signifikan dikarenakan dengan kenaikan tingkat pendidikan berarti kemampuan produktivitas seseorang akan meningkat dalam dunia pekerjaan, sehingga memaksa perekonomian meningkatkan produksi. Peningkatan produksi akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan sebaliknya. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas output yang diproduksi produsen dan secara langsung akan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut (Buchari, 2016). Berdasarkan pada teori *Human Capital*, jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang terbatas, namun jika mempunyai modal manusia (*human capital*) yang berkualitas dan terampil maka negara tersebut dapat memanfaatkan modal fisik dan sumber daya alamnya secara efisien seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Oleh karena itu penting bagi suatu negara meningkatkan kualitas human capital untuk kepentingan pembangunan. Hasil studi literatur dalam bidang ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa modal manusia adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi (Ogundari & Awokuse, 2018; Sultana et al., 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui pendalaman modal, devisa, impor teknologi, dan peningkatan produktivitas secara umum (Dankyi, Abban, Yusheng & Coulibaly, 2022) serta melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, kesehatan dan imigrasi (Schultz, 1961 & Becker, 1993). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Windayana&Darsana (2020), bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pendidikan adalah faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan manusia yang akan meningkatkan produktivitas dan kompetensi (Hanif & Noman, 2016).

Pengaruh Langsung UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara statistik upah minimum berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya upah minimum menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai negatif sebesar 1,298 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ yang berarti H_1 tidak diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis upah minimum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai koefisien beta sebesar -1,298 bermakna apabila upah minimum meningkat 1 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,298 persen dengan asumsi *ceterisparibus*. Hasil penelitian yang menunjukkan hasil hubungan negatif antara upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya timbal balik

antara pendapatan akan upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara upah minimum dan pertumbuhan ekonomi sering kali berfokus pada dampak kenaikan upah minimum terhadap lapangan kerja dan investasi. Ketika upah minimum dinaikkan secara signifikan, perusahaan dapat menghadapi peningkatan biaya tenaga kerja, yang menyebabkan pengurangan jumlah karyawan, pengurangan jam kerja, atau bahkan pengalihan pekerjaan ke otomatisasi. Ini dapat meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan pekerja berpenghasilan rendah. Selain itu, biaya operasional yang lebih tinggi dapat menghambat keputusan investasi perusahaan, mengurangi investasi dalam pengembangan atau ekspansi, dan membatasi peningkatan produktivitas, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kenaikan upah minimum juga dapat memicu inflasi, karena perusahaan mungkin menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya tambahan, sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan penurunan permintaan agregat. Dalam jangka pendek, meskipun ada peningkatan pendapatan bagi sebagian pekerja, dampak negatif seperti pengangguran dan inflasi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan siklus meruginan yang berdampak pada kemampuan pemerintah untuk mendanai program sosial bagi pekerja berpenghasilan rendah. Hasil penelitian ini didukung salah satu penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maitra & Mani (2021), bahwa menganalisis dampak kebijakan upah minimum pada sektor manufaktur di India dan menemukan bahwa peningkatan upah minimum secara signifikan mengurangi tingkat pekerjaan di sektor tersebut, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, didukung oleh penelitian Rani dan Sethi (2022) dalam *International Journal of Economic Perspectives* menganalisis dampak kebijakan upah minimum di berbagai negara bagian India dan menemukan bahwa peningkatan upah minimum berhubungan dengan penurunan lapangan kerja. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya biaya tenaga kerja yang membuat perusahaan lebih cenderung untuk mengurangi jumlah karyawan atau mengalihkan investasi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek negatif pada lapangan kerja dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, mengindikasikan bahwa meskipun upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, ada risiko signifikan yang harus dipertimbangkan terkait dampaknya pada ekonomi secara keseluruhan.

Pengaruh Langsung Penduduk yang Bekerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara statistik penduduk yang bekerja berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya penduduk yang bekerja menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta penduduk yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai positif sebesar 0,858 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis penduduk yang bekerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar 0,858 bermakna apabila penduduk yang bekerja meningkat 1 orang maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,858 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil regresi yang signifikan dikarenakan semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dan penelitian Musfiar (2012) dan Fleisher et al (2007) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk yang bekerja sangat erat kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian suatu daerah. Adapun dukungan penelitian lainnya yaitu hasil penelitian ini

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Sudibia (2017) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dimana kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk yang bekerja sangat erat kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah.

Pengaruh Langsung Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara statistik investasi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bernilai negatif sebesar -1,513 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ yang berarti H_1 ditolak. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai koefisien beta sebesar -1,513 bermakna apabila investasi meningkat 1 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,049 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Berdasarkan teori pertumbuhan Solow, akumulasi modal yang digunakan untuk melakukan pengadaan faktor-faktor produksi baru atau untuk meningkatkan kualitas faktor-faktor produksi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal berupa investasi akan memberikan dampak pada ekonomi dan kesempatan kerja sehingga meningkatkan pendapatan nasional yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Wiagustini dkk (2017) Proses pembangunan ekonomi modal menjadi objek penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut Jhingan (2004:229), sesuai dengan teori pertumbuhan dari Harrod Domar, bahwa investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Bhinadi (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh barang modal, tenaga kerja dan perubahan produktivitas dari faktor produksi tersebut. Peningkatan investasi (barang modal) dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jika investasi bertambah maka pertumbuhan ekonomi pun meningkat dan jika investasi berkurang maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Todaro & Smith (2011:137) menyatakan bahwa investasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru. Menurut Setijawan (2021) investasi adalah hal krusial dalam pembangunan ekonomi, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Yuliana (2019) dan Susilo (2018) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, disebutkan bahwa investasi memiliki hubungan jangka panjang serta memiliki kendali dalam pertumbuhan ekonomi. Sari&Aswitari (2020) investasi memiliki pengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian oleh Manurung dkk (2022) dengan judul Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten mengemukakan hasil bahwa PMTB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, hasil penelitian sejalan dengan penelitian Bhasin & Mishra (2023), menganalisis hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, menemukan bahwa dalam konteks tertentu, peningkatan investasi dapat berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun investasi biasanya dianggap sebagai pendorong pertumbuhan, faktor-faktor seperti kebijakan yang tidak tepat dan kondisi makroekonomi yang tidak stabil dapat

menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan yang baik dan stabilitas ekonomi untuk memaksimalkan manfaat investasi. Dalam penelitian Alfaro & Chandra (2023) juga menyatakan bahwa di negara-negara dengan pasar keuangan yang lemah, investasi asing langsung (FDI) dapat memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk memanfaatkan investasi secara efektif, akibat dari struktur pasar yang tidak memadai, dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menyoroti pentingnya konteks ekonomi dan infrastruktur keuangan dalam menentukan dampak investasi terhadap pertumbuhan.

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan, UMK, Penduduk yang Bekerja, dan Investasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2018 – 2022

Pengaruh Langsung Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022

Secara statistik tingkat pendidikan berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang akan menyebabkan menurunnya kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta tingkat pendidikan terhadap kemiskinan bernilai negatif -0,825 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar -0,825 bermakna apabila pendidikan meningkat 1 tahun maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,825 persen. Hasil analisis menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai keterkaitan yang erat terhadap pengurangan kemiskinan, dimana jika tingkat pendidikan naik maka kemiskinan akan menurun. Hasil serupa diperoleh dalam penelitian Seran (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yakni melalui pendidikan akan membuka peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi saat ini ataupun di masa mendatang.

Pengaruh Langsung UMK terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022

Secara statistik upah minimum berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya upah minimum menyebabkan penurunan kemiskinan. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta upah minimum terhadap kemiskinan bernilai negatif sebesar -0,373 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,002) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar -0,373 bermakna apabila upah minimum meningkat 1 juta rupiah maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,373 persen dengan asumsi *ceterisparibus*. Upah minimum dapat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui beberapa mekanisme. Pertama, peningkatan upah minimum yang signifikan dapat menyebabkan pengangguran, terutama di kalangan pekerja berpenghasilan rendah, karena perusahaan mungkin mengurangi jumlah karyawan atau jam kerja untuk mengelola biaya yang lebih tinggi (Neumark & Wascher, 2008).

Selain itu, kenaikan upah minimum sering kali diikuti oleh peningkatan harga barang dan jasa, yang dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga pekerja berpenghasilan rendah dapat terjebak dalam kemiskinan meskipun mendapatkan upah yang lebih tinggi (Rani & Sethi, 2022). Selain itu, kebijakan upah minimum dapat mendorong pengusaha untuk beralih ke sektor informal, di mana pekerja tidak mendapatkan perlindungan sosial atau upah yang layak, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Dube et al., 2010). Dalam konteks ini, meskipun tujuan dari kebijakan upah minimum adalah untuk mengurangi kemiskinan, dampak negatif seperti pengangguran, inflasi, dan dampak pada sektor informal dapat menciptakan kondisi yang sebaliknya (Maitra & Mani, 2021). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Tanjung & Rahman (2022) bahwa peningkatan upah minimum secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa meskipun upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampaknya terhadap lapangan kerja dan pengurangan jam kerja menyebabkan beberapa pekerja kehilangan pendapatan, sehingga mengakibatkan peningkatan kemiskinan di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Hasil ini menegaskan pentingnya pertimbangan terhadap kondisi pasar tenaga kerja saat merumuskan kebijakan upah minimum.

Pengaruh Langsung Penduduk Bekerja terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022

Secara statistik penduduk yang berkerja berpengaruh langsung positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya penduduk yang berkerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta penduduk yang berkerja terhadap kemiskinan bernilai positif sebesar 0,060 dengan nilai signifikansi sebesar $0,529 > 0,05$ yang berarti H_1 ditolak. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis penduduk yang berkerja berpengaruh positif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai koefisien beta sebesar 0,060 bermakna apabila penduduk yang berkerja meningkat 1 orang maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0,060 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil analisis menyatakan bahwa penduduk yang berkerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penduduk berkerja berpengaruh tidak signifikan pada penelitian ini berarti penduduk berkerja memiliki pengaruh arah yang positif terhadap kemiskinan tetapi pada saat ini belum mampu menurunkan atau berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangat kompleks dan seringkali melampaui hanya tingkat partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Adanya ketimpangan pendapatan yaitu meskipun seseorang berkerja, penghasilannya mungkin tidak mencukupi untuk keluar dari garis kemiskinan. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat upah, pekerjaan informal dengan penghasilan rendah, atau ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Dengan demikian, meskipun anggota penduduk berkerja, mereka masih dapat berada di bawah garis kemiskinan karena berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural yang kompleks dan saling terkait. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu (2014) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah penduduk berkerja akan mengurangi jumlah kemiskinan, sebab penduduk yang berkerja biasanya akan mampu mendapatkan kesejahteraan lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak berkerja. Secara ekonomis penduduk yang berkerja akan memperoleh penghasilan yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengaruh Langsung Investasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022

Secara statistik investasi berpengaruh langsung negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan investasi menyebabkan kemiskinan menurun, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta investasi terhadap kemiskinan bernilai negatif sebesar -0,272 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,069) > 0,05$ yang berarti H_1 tidak diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah tidak terbukti. Nilai koefisien beta sebesar 0,272 bermakna apabila investasi meningkat 1 juta rupiah maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,272 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah investasi yang diperoleh Provinsi Bali, maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh negatif dari variabel investasi disebabkan oleh tidak meratanya penanaman modal atau investasi yang masuk. Banyak investasi hanya terfokus pada daerah-daerah Bali Selatan yang mempunyai objek wisata, sedangkan daerah Bali Timur maupun Bali Utara tidak kurang mendapatkan investasi. Keadaan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Bali, yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan di daerah atau wilayah yang tingkat pembangunan yang rendah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Jana dan Yasa (2019) yang memperoleh hasil bahwa investasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi yang masuk ke suatu daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap kapital di daerah serta kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini, investasi memberikan pengaruh negatif artinya, jika arus investasi ke suatu daerah berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan menaikkan penawaran melalui peningkatan stok kapital yang ada. Selanjutnya, peningkatan stok kapital ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut (Rizal dalam Dewi, 2015). Artinya semakin tinggi akumulasi kapital maka akan merangsang semakin meningkatnya kesempatan kerja maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada menurunnya jumlah kemiskinan. Hasil penelitian tidak signifikan sejalan dengan penelitian Sari & Utami (2023), bahwa meskipun investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan tidak signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti kebijakan sosial dan pendidikan, lebih berperan dalam mengatasi kemiskinan dibandingkan dengan investasi semata. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022

Secara statistik pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan tingkat kemiskinan menurun. Hasil pengujian memperoleh nilai koefisien beta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan bernilai negatif sebesar -0,158 dengan nilai signifikansi sebesar $(0,024) < 0,05$ yang berarti H_1 diterima. Hasil dari ini menunjukkan bahwa hipotesis pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat

kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah terbukti. Nilai koefisien beta sebesar - 0,158 bermakna apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,158 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan yang mengarah pada peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pendapatan yang lebih tinggi akan memungkinkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, sehingga mampu terlepas dari kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memberikan akses penduduk untuk memperoleh fasilitas Kesehatan dan pendidikan yang nantinya akan mampu melepaskan dari lingkaran setan kemiskinan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memediasi pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk bekerja, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain tingkat pendidikan, upah minimum, jumlah penduduk bekerja, dan investasi, berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Jana dan Yasa (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memediasi secara parsial pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dengan syarat bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menyebabkan terjadinya ketimpangan antar masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh sebagian orang atau golongan tertentu saja tidak akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan menambah tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan orang-orang yang masuk dalam golongan miskin tidak dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas dapat diuraikan beberapa implikasi yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini didasarkan atas teori ekonomi neoklasik yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait faktor produksi diantaranya tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan melalui pengalaman kerja, pendidikan yang memadai, dan dari data penelitian diketahui penduduk yang bekerja meningkat sejalan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah atau tahun lama sekolahnya. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau pembandingan bagi penelitian berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian lain yang sejenis. Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan serta peranan pertumbuhan ekonomi terbukti memediasi tingkat pendidikan, upah minimum, penduduk yang bekerja, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan pada masa yang akan datang. Hasil analisis data yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan, upah minimum, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat apabila pemerintah terus memperbaiki sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan. Semakin tingginya pendidikan seseorang maka meningkatkan diterimanya penduduk dalam dunia kerja yang berkualitas sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya angka kemiskinan. Investasi dalam pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kebijakan upah minimum harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kenaikannya tidak mengakibatkan pengurangan lapangan kerja, tetapi tetap memberikan perlindungan bagi pekerja. Dengan mengintegrasikan pendidikan yang berkualitas dan kebijakan ketenagakerjaan yang bijak, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tingkat pendidikan dan penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan sedangkan UMK dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan, UMK, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan tidak signifikan, serta investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat Pendidikan, UMK, penduduk yang bekerja, dan investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai berikut: Bagi pemerintah diupayakan selalu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sehingga terjamin pemerataan pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta tetap berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari masyarakat. Pemerataan investasi dimulai dari pemerataan antara investasi Bali Selatan dengan Bali Utara, di mana telah terjadi disparitas investasi yang tinggi. Sehingga pemerataan investasi yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan investasi karena dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, saat ini investasi belum mampu menekan angka kemiskinan sehingga perlu ditindak lanjuti perihal perizinan investasi. Hal ini dikarenakan investasi asing bisa dikurangi karena akan mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan menyesuaikan potensi daerah masing-masing, sehingga nantinya potensi daerah tersebut dapat dikembangkan untuk menarik investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri sehingga akan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kepada pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk lebih menggali potensi daerahnya sehingga nantinya ekonomi daerah bisa semakin bertumbuh, lapangan pekerjaan semakin banyak sehingga banyak tenaga kerja yang mampu diserap dan diberdayakan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. H. (2004). "Economic growth, inequality and poverty: estimating the growth elasticity of poverty". *World Development*, Vol.32 No.12 Hal.1989-2014
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.
- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2023). "Does Foreign Direct Investment Promote Growth? Exploring the Role of Financial Markets." *Journal of Development Economics*, 153, 102693.
- Alghofari, Farid. (2010). Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Univ.Diponegoro Semarang*.
- Anderson, Courtney Lauren. (2012). Opening Doors: Preventing Youth Homelessness Through Anom Iswara, I Made Dan I Gusti Bagus Indrajaaya. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2011. *EJurnal EP Unud*, Vol.3 No.11 Hal.492-501.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit BP STIE YKPN.
- Ayu Purnama Margareni, Ni Putu, I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.12 No.1 Hal.101-110.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Banyaknya Pengangguran Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Provinsi Bali Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Rata-rata lama sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2018-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2023). *Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik.Provinsi Bali (2024). *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Bali.
- Bank Indonesia. (2017). *Metadata Produk Domestik Regional Bruto*. www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf. Diakses 10 Maret 2017
- Bappeda. (2021). *Penetapan Kebijakan Umum Anggaran 2021*
- Barber, C. (2008). 'Notes on poverty and inequality'. Background Paper. Oxford: Oxfam International.
- Barimbing, Yesika Resianna, Ni Luh Karmini. (2015). Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Vol.4 No.5 Hal.434-450
- Bhasin, M., & Mishra, R. (2023). Investment, economic growth, and financial instability: Evidence from emerging markets. *Journal of Economic Studies*.

- Boediono (2017) Revisiting the Problem of Development Distribution, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.53 No.2 Hal.211-217
- BPS Provinsi Bali, (2014). *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Buchari, Imam. 2016. Pengaruh Upah Minimum dan tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015. *E-Journal STIE Dewantara*, Vol. 11 no.1
- Chon, Elchanan, (1997). *The Economics of Education: An Introduction*. Massachusetts: Ballinger Publishing Company
- Constantinos, Alexiou, (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research*. Vol.11 No.1 Hal.1-16
- Danawati, Sri, I Koamng Gde Bendesa, Made Suyana Utama. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.5 No.7 Hal.2337-3067
- Dewi, P., & Bendesa, G. (2023). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 12(8), 571-585.
- Dewi. (2015). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.4 No.6 Hal.621-636.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan, dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dube, A., & Kaplan, E. (2020). Does raising the minimum wage reduce employment? Evidence from the minimum wage experiment in Seattle. *Industrial Relations Research Association*, 79(2), 100-125.
- Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*. Vol.127 No.2 Hal.407- 437.
- Fazaalloh, Al Muizzudin. (2019). Penanaman Modal asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Suatu Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.12 No.1
- Fleisher, Belton, Haizheng Li dan Min Qiang Zhao. (2007). Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. *IZA Discussion Paper, No. 2703. Department of Economics, The Ohio State University*
- Fosu, Augustin Kwasi. (2010). Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *CSAE Working Paper WPS*, 07. Hal.306-336
- Ganie-Rochman, Meuthia. (2013). *Disparitas Pendapatan*. Kompas.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM SPSS)*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanif, Nadia & Noman Arshed. (2016). Relationship Between School Education and Economic Growth: SAARC Countries. *International Journal of Aconomic and Financial Issues*
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendra Esmara. (1991). *Teori Ekonomi Makro dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Hill, Hal. (1998) The Chalenge of Regional Development in Indonesia. *Australian Journal of International Affairs*. Vol.52 No.1 Hal.19-34 .
- Housing and Education Collaboration. *Seattle Journal for Social Justice*. Vol.11 No.2 Hal.457-522
- Iksan, M., & Arka, S. (2022). Pengaruh Upah, Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Serta Kemiskinan Provinsi Jabar Bagian Selatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11 (1), 147.

- Indra Riko Rosandi, et. al., "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda)", *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 5, 3 (2017), 1119-1130.
- Inna Dariwardani, Ni Made. (2014). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008–2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.7 No.1 Februari 2014 Hal.7-15.
- Jana Loka Adi Parwa, I Gusti Ngurah, I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol.8 No.5 Hal.945973
- Jhingan, M. L. (2003). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kacem, Rami Ben Haj. (2012). Monetary versus Non-Monetary Pro-Poor Growth: Evidence from Rural Ethiopia between 2004 and 2009. *Economics Discussion Papers*. Hal. 20-62
- Kembar Sri Budhi, M. (2013). Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vo. 6 No., 1–6.
- Klein and Dompe. (2007). Reasons for Supporting the Minimum Wage: Asking Signatories of the "Raise the Minimum Wage" Statement. *Economic in Practice. Department of Economics, George Mason University*. Vol.04 No.01 Hal.125-167
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Lindblad, J. Thomas. (2015). Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, Vol.51 No.2 Hal.217-273.
- Luh Made Arisusanti, P. D. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Upah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia. *E - Jurnal EP Unud*, 111.
- Maitra, P., & Mani, S. (2021). "Minimum Wages and Employment: Evidence from Indian Manufacturing." *Labour Economics*, 67, 101905.
- Mankiw, D.Romer, D. Weil. (1992). A Contribution to The Empirics of the
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Salemba Empat
- Maulana, R. (2020). Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan kemungkinan Untuk Bekerja di Sektor Formal. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 133 - 144
- Michael P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga, Edisi 9, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar. UndangUndang No. 25 Tahun (2005) *Tentang Penanaman Modal*.
- Michael P. dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ke 8*. Jakarta: Erlangga.
- Muhardinata, M., Erlina, E., & Rujiman, R. (2022). The Effect Of Transfer Funds And Regional Original Income (Pad) On Poverty Levels In Regencies/Cities Of North Sumatra Province. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4), 1219–1222. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.566>
- Mulyaputri, I. G., & Kartika, I. N. (2020). Pengaruh Investasi Swasta dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Unud*, 9(4), 935-962.
- Mulyaputri, I. G., & Kartika, I. N. (2020). Pengaruh Investasi Swasta dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Unud*, 9(4), 935-962.

- Murdiansyah, Isnan. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang, *Jurnal Wiga*. Vol.4 No.1 Hal.71-92.
- Musfidar, Ma'mun. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar*
- Musliadi. (2013). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada
- Myanti Astrini, A. Ni Made dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2013). Pengaruh
- Neumark, D., & Wascher, W. (2008). *Minimum Wages*. MIT Press.
- Oghuvbu. Enamiroro Patrick. (2007). Education, Poverty and Development in Nigeria : The Way Forward in the 21th Century. Abraka Nigeria, Delta State University. *J. Soc.Sci.*, Vol.14 No.1 Hal.19-24.
- Pande Made Viera Abimanyu, I. A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Ejurnal EP Unud*, 29.
- Pangestu, Subagyo; Djarwanto Ps. (1996). *Statistik Induktif Edisi Empat*. Yogyakarta: Badan Percetakan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Pardede, Raden and Shirin Zahro (2017) Saving not Spending: Indonesia's Domestic Demand Problem, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.53 No.3 Hal.233-259
- PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Ejurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Udayana*. Vol.2 No.8 Hal.384-392
- Pratowo, Nur Isa. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*. Vol.1 No.1 Hal.15-31.
- Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M. (2013). Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengetasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM data panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Putu, N. N. P. D. Y., & Purwanti, A. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- Rahayu, Shabrina Umi dan Ni Made Tisnawati. (2014). Analisis Pendapatan Keluarga Wanita Single Parents (Studi Kasus Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Universitas Udayana*. Vol.7 No.2 Hal.83-89
- Rahayu, Y. (2018). Analisa Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Perkapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *Journal of Economics and Business*.
- Rani, U., & Sethi, N. (2022). The impact of minimum wage on employment and economic growth: Evidence from Indian states. *International Journal of Economic Perspectives*, 16(1), 45-60.
- Ranis, Gustaw Stewart. (2001). Economic Growth and Human Development. *World Development*. Vol.28 No.2 Hal.197-219.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun (2003) Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Rodriguez-Pose, A. and D. Hardy. (2015). *Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global*. Applied Geography.
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1-7.

- Sabia, Joseph. (2008). The Effects of Minimum Wage Increases in New York State: *Evidence From a Natural Experiment*. Department of Public Administration and Policy American University.
- Sandhika, Ardyan Wahyu, Mulyo Hendarto. (2012) Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal. *Diponegoro Journal of Economics*. Vol.1 No.1 Hal.1-6
- Sarah, Dong Xue; Manning, Chris. (2017). Labour-Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*. Vol.53 No.1 Hal.10.
- Sarungu, J.J, Maharsi, Endah K. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.6 No.2 Hal.112.
- Sasih Purnami, Ni Made dan Ida Ayu Nyoman Saskara. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.5 No.11 Hal. 1188-1218
- Sefa, Awaworyi Churchill, Siew Ling Yew and Mehmet Ugur, (2015). Effects of Government Education and Health Expenditures on Economic Growth: A Meta-analysis. *International Journal of monash.edu/ businesseconomics*. Vol.40 No.15 Hal.1-26
- Seran, Sirilius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.10 No.2 Hal.5971
- Setyopurwanto, Didi. (2013). Pengaruh investasi sumber daya manusia dan investasi modal terhadap pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Brawijaya*. Vol.1 No.1 Hal.1-15
- Siagian, Sondang P. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Bumi Aksara.
- SMERU. (2001). Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Tim Peneliti SMERU*.
- Sudibia, I Ketut dan Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. (2013). Beberapa Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.9 No.1 Hal.1-14
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Ed. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmaraga, Prima. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Sulistiawati, Rini. (2012). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.3 No.1 Hal.29
- Suyana Utama, I Made. (2009). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Tanjung, F. E., & Rahman, A. (2022). Analisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 15-30.
- Todaro, P. M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Utama, Made Suyana. (2021). *Metode Kualitatif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Denpasr: Satra Utama

- Vincent, Brian. (2009). The Concept 'Poverty' towards Understanding in the Context of Developing Countries 'Poverty qua Poverty'. *Journal of Sustainable Development*, Vol.2 No.2 Hal.3-13
- Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economic Development Analysis Journal*. Vol.1 No.2 Hal.1-11.
- Williamson, Deanna L. (2001). The Role of The Health Sector in Addressing Poverty. *Canadian Journal of Public Health* , Vol.92 No.3 Hal.178-183
- Windayana, Ida Bagus Agung Bayu& Ida BagusDarsana. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 9 no. 1
- Yasa, Oka Artana dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.8 No.1 Hal.63-71
- Yintayani, N. N., Suarjana, A. A. G. M., & Murni, N. G. N. S. (2019). Influence of Local Original Revenue and Economic Growth on Poverty Rate in Regency/City of Bali Province. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(2), 85-94. <https://doi.org/10.31940/jbk.v15i2.1410>
- Yogi Swara, Wayan dan I Made Jember. (2011). Kemiskinan di Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.7 No.2 Desember 2011
- Yuni Adipuryanti, Ni Luh Putu dan I Ketut Sudibia. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA* Vol.11 No.1 Hal.20-28